

## **KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN PARIWISATA PANTAI PARANGTRITIS**

**Monika<sup>1</sup>, Adji Suradji Muhammad<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

Email Korespondensi: <sup>1</sup> [085246ikha@gmail.com](mailto:085246ikha@gmail.com)

**Abstrak :** Penertiban pariwisata di pantai Parangtritis merupakan suatu bentuk dalam melastarikan alam, budaya, lingkungan dan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana kolaborasi (*collaborative*) antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penertiban pariwisata di pantai Parangtritis. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menemukan makna dari penemuan di lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini berdasarkan pada teori *Ansel, dkk* yang melihat bagaimana kolaborasi pemerintah dapat terbagi menjadi 3 proses yaitu (1) partisipasi pemangku kepentingan, (2) ada kondisi kesetaraan kekuasaan, dan (3) ada aktor berkompeten.

**Kata kunci:** Kolaborasi Pemerintahan, Pengelolaan, Pariwisata

**Abstract:** *Controlling tourism on Parangtritis Beach is a way of preserving nature, culture, and the environment and can also increase community participation. Therefore, the problem raised in this research is the extent of collaboration between the government and the community in the process of controlling tourism on Parangtritis Beach. This research method uses qualitative methods to find the meaning of findings in the field, while data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The focus of this research is based on the theory of Ansel et al., which sees how government collaboration can be divided into three processes: (1) stakeholder participation, (2) conditions of equality of power, and (3) competent actors.*

**Keywords:** *Collaboration in Government, Management, Tourism*

### **Article History :**

Received; Revised; Accepted 3 July 2024

## **PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan rasa stress dan dengan menikmati pemandangan yang luar biasa disuguhkan objek wisata. Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Kodhyat (1998), pariwisata adalah sebagai perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain. Baik yang dilakukan secara perorangan, kelompok atau pun usaha. Dimana orang yang melakukan perjalanan wisata ini memiliki kepentingan untuk keseimbangan mental, misalnya mengurangi stress, menghibur diri dan refreshing.

Keputusan orang untuk melakukan perjalanan wisata bermula dari keinginan manusia untuk menikmati pemandangan yang ada di objek wisata, oleh karena itu pariwisata harus dikelola dan dikembangkan secara baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Perkembangan tata kelola pada pemerintahan, collaborative governance (tata kelola pemerintahan kolaborasi) menjadi fenomena dan (trend) baru yang menarik diteliti Ansell dan Gash (dalam Zaenuri 2016). Collaborative Governance merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapat atkan sumberdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki oleh para pemegang kepentingan ( Sambodo, 2016).

Ansell dkk (dalam Tresiena dkk, 2017) mengkonfiliasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu: (1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan, (2) Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, dan (3) Terdapat aktor-aktor yang kompeten.

Pariwisata memiliki sifat yang kompleks oleh karena itu dalam mengelolah pariwisata perlu adanya kerjasama antara swasta, pemerintah maupun masyarakat agar pariwisata dapat berkembang secara baik, benar dan memberikan manfaat bagi manusia. Pembangunan pariwisata mampu menggairahkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Ketika pariwisata direncanakan dengan baik, mestinya akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada sebuah destinasi. Muncul dan berkembangnya kegiatan pada pariwisata tidak lain karena di wilayah tersebut terdapat objek yang spesifik dan unik sehingga memiliki daya tarik yang tidak ada di tempat lain sehingga menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Sebagaimana diketahui bahwa wisata mempunyai hakekat keunikan, kekhasan, perbedaan, orisinalitas, keanekaragaman, dan 3 kelokalan sehingga menarik banyak orang untuk melakukan perjalanan wisata. Inskeep (dalam zaenuri; 2016).

Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berada di Indonesia. Kota ini adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya jawa, dan menawarkan berbagai objek wisata baik itu wisata alam, budaya dan buatan. Banyaknya objek wisata yang ada di Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2023 wisman mencapai 184,224 kunjungan.

Dalam penertiban pariwisata pantai parangtritis tidak hanya pemerintah kabupaten sendiri yang melakukan tetapi pihak-pihak lain juga ikut ambil bagian, yang dibantu masyarakat lokal dan melibatkan masyarakat setempat dalam penertiban pariwisata. Pariwisata pada dasarnya merupakan suatu kegiatan seseorang atau kelompok mengunjungi suatu tempat untuk rekreasi dimana terjadi interaksi sosial antara wisatawan dengan penduduk yang dapat memungkinkan timbulnya permasalahan atau konflik, salah satu contoh. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan yang terjadi antara wisatawan dengan penduduk maka diperlukannya instrument dari pemerintah setempat yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan maka fungsi penertiban ini sangatlah penting.

Parangtritis merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang tentunya memiliki daya tarik tersendiri untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini didasarkan pada potensi wisata yang dimilikinya. Daerah yang dikenal sebagai pantai selatan ini memiliki letak geografis yang terdiri dari daerah pegunungan dan pesisir pantai sehingga memiliki kekayaan objek budaya dan objek wisata. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Salah satu objek yang sangat diminati oleh para wisatawan adalah pantai Parangtritis karena keindahan pasir hitam yang terhampar luar dan air laut yang jernih membuat pemandangan di Pantai ini menjadi sangat menakjubkan.

Pantai Parangtritis merupakan pantai berpasir hitam yang sangat terkenal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan keindahan yang dimiliki pantai Parangtritis membuatnya terkenal di mancanegara. Keindahan pantai Parangtritis tidak diragukan lagi hamparan pasir hitam yang luas dan airnya yang jernih membuat nyaman wisatawan. Para wisatawan dapat menghabiskan waktunya untuk menikmati matahari terbit dan matahari tenggelam, dan menghabiskan waktu liburanya dengan berenang, menyelam, atau hanya sekedar menikmati segarnya angin yang berhembus bersama keluarga.

Objek Pariwisata Pantai Parangtritis terletak di kecamatan Ketek kabupaten Bantul yang terletak diantara 7°58'33" LS sampai dengan 8°2'26"LS dan diantara 110°25'15 BT sampai dengan 110°28'15'. Fenomena potensi pantai Parangtritis adalah salah satu obyek wisata pantai yang paling banyak menyita perhatian wisatawan, tidak hanya sebagai tujuan wisata alamnya saja melainkan juga menjadi tujuan wisata religi dan budaya.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, dapat di ketahui bahwa dalam mengelola dan penertiban pariwisata pantai parangtritis, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat. Dasar dari kolaborasi antara kedua pihak adalah SK Kepala Dinas Pariwisata yang mengakui bahwa pengelolaan pariwisata pantai parangtritis terjadi kolaborasi karena adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam merawat dan mengembangkan objek wisata tersebut. Namun kolaborasi yang dilakukan ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena masyarakat tidak terlalu aktif dan masih kurangnya informasi serta upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga kolaborasi tidak berjalan dengan efektif.

Objek wisata pantai parangtritis yang sudah mendunia memiliki potensi yang sangat besar. Pantai parangtritis menawarkan hal seperti pantai pasir hitam dan pemandangan alam bawah laut. Namun dalam pengelolaannya masih mengalami kendala. Peran pemerintah kabupaten sebagai pengelola belum maksimal dan menunjukkan keterbatasan dalam kapasitasnya mengelola pariwisata. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menjadi persoalan yang mendasar untuk mengembangkan sektor pariwisata pantai parangtritis. Karena untuk mengembangkan pantai parangtritis dibutuhkan sumber daya yang memadai.

Penertiban pariwisata. harus melibatkan pemerintah, semua lapisan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan. atas serta swasta. Semuanya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata untuk menunjang penertiban pariwisata. Masyarakat mempunyai dorongan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa harus ikut membantu. Mereka akan tertarik untuk ikut serta menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah paham akan mendapat manfaat yang positif.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan nonpemerintah dalam melakukan kolaborasi agar pariwisata dapat dikelola dengan baik. Karena didalam kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah aktif berpartisipasi. Sehingga pariwisata dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan bias memberikan manfaat. Dan ada beberapa kelompok yang ikut berpartisipasi selain Pemerintah Kabupaten dan masyarakat lokal yang berperan dalam penertiban pariwisata pantai parangtritis tetapi ada juga kelompok lainnya seperti Dinas Pariwisata, Satpol Pp, Pokdarwis ( pembinaan kelompok sadar wisata ), dan kelompok masyarakat lokal ikut berkolaborasi yaitu Pokja Pokdarwis, Jaga Satru, SOSDL ( SaveOurSandDunesLives ).

Berdasarkan paparan di atas menjadi pertimbangan atau alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul” dalam penulisan proposal ini penulis mencoba menggali informasi mengenai kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, dan masyarakat dalam mengelola pariwisata di pantai Parangtritis.

**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu

1.	<p><b>Penulis Tahun &amp; Judul</b> Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. ( Fahriadi &amp; Adianto, 2023 )</p> <p><b>Teori &amp; Metode</b> Teori yang digunakan yaitu teori Ansell dan Gash (2008). Dimana dalam proses collaborative governance Ansell dan Gash diukur menggunakan 5 indikator, adapun indikator tersebut yaitu sebagai berikut: Dialog tatap muka (Face to face dialog); Membangun kepercayaan (Trust Building); Komitmen Terhadap Proses (Comitment to Process); Saling Memahami (Share understanding). Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian adalah Kualitatif yang bersifat deskriptif.</p> <p><b>Hasil Penelitian</b> Hasil penelitian menyimpulkan menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik oleh kedua belah pihak. Indikator pertama yaitu face to face dialogue sudah dilaksanakan dengan baik, yang mana pihak yang saling terlibat walaupun tidak memiliki jadwal tetapi proses dialog tatap muka tetap dalam bentuk musyawarah berjalan oleh masing-masing pihak. Indikator kedua yaitu trust building sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan keyakinan masing-masing pihak saling percaya satu sama lain berkontribusi dengan keterbukaan informasi. Indikator ketiga yaitu comitment to process sudah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak, dimana hal ini terjadi karena masing-masing aktor berkesadaran untuk bersinegritas dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis agar dapat teratasi. Indikator keempat yaitu shared understanding sudah dilaksanakan dengan optimal, dimana hal ini tampak membangun part of them satu sama lain. Sedangkan Indikator kelima yaitu intermediate outcomes telah mendapatkan hasil yang cukup optimal dimana dapat dilihat dari jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru menjadi berkurang dari seperti biasanya.</p> <p><b>Persamaan</b> Persamaan pada penelitian terdahulu ini adalah terdapat pada metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p> <p><b>Perbedaan</b> Perbedaan pada penelitian terdahulu ini adalah terdapat pada kajian fokus yang berbeda dalam penelitian terdahulu membahas Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis.</p>
2.	<p><b>Penulis, Tahun &amp; Judul</b> Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Merespon Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Pendekatan Crisis Visualizations. ( Tiffany Setyo &amp; Pugh Toko Arisanto 2021 ).</p> <p><b>Teori &amp; Metode</b> Teori yang digunakan yaitu Assell dan Gash (2008) menambahkan bahwa ada 6 kriteria atau ukuran</p>

	<p>dalam CG yaitu: 1. Forum diinisiasi oleh badan pemerintah 2. Aktor non Pemerintah terlibat dalam forum Proceeding Peserta ikut dalam pengambilan keputusan tidak sekedar dikonsultasikan 4. Forum dikelola secara formal 5. Forum bertujuan menghasilkan keputusan melalui musyawarah 6. Kolaborasi berfokus pada masalah kebijakan atau manajemen publik. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah melalui pendekatan crisis visualizations.</p> <p><b>Hasil Penelitian</b> Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kolaborasi pemerintah DIY dan masyarakat sipil dalam pendekatan visualisasi krisis tidak terjadi secara langsung, melainkan komunikasi visualisasi krisis ditemukan dalam olah data mentah untuk membuat informasi visual, misalnya data pasien positif di lingkungan RT/RW setempat. Pembuatan visualisasi krisis yang terdiri atas enam bentuk yakni informasi krisis dalam bentuk visualisasi temporal dan geospasial (peta krisis); meramalkan tren dan pengaruh; sifat krisis; panduan mitigasi resiko; visualisasi informasi resiko, kerentanan dan keadilan; dan mengukur dampak multi efek krisis dikelola oleh pemerintah DIY. Namun secara intens kolaborasi keduanya pada aspek edukasi, pertemuan informal dalam upaya memberikan masukan terhadap kebijakan terkait pandemi dan membantu menyebarluaskan informasi - informasi mengenai pencegahan Covid-19 dilakukan.</p> <p><b>Persamaan</b> Persamaan pada penelitian terdahulu adalah terdapat pada teori yang digunakan yaitu Anssel dan Gash.</p> <p><b>Perbedaan</b> Perbedaan pada penelitian terdahulu adalah kajian fokus yang berbeda, dalam penelitian terdahulu membahas Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Merespon Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Pendekatan Crisis Visualizations. Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis.</p>
3.	<p><b>Penulis, Tahun &amp; Judul</b> Kolaborasi Pemerintah dalam Pembangunan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). ( Yusuf Fadli &amp; Adie Dwiyanto Nurlikman, 2018 ).</p> <p><b>Teori &amp; Metode</b> Teori yang digunakan Dalam perwujudan good governance, setidaknya ada tiga prinsip penting yang menjadi perhatian, yaitu transparansi (keterbukaan), partisipasi (keterlibatan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) (David &amp; Gaebler, 1992). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah kualitatif.</p> <p><b>Hasil Penelitian</b> Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Gerbang Mapan sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah memilih kelompok-kelompok masyarakat pesisir yang memiliki kemampuan dan potensi untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Dinas kelautan dan perikanan untuk menjadi leading sector sekaligus berperan dalam melaksanakan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan dengan membagi focus pelaksanaan Gerbang Mapan menjadi 3 tahun yakni tahun 2015 difokuskan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dirumuskan dalam FGD pada tahun 2014, tahun 2016 di fokuskan kepada kelompok budidaya tambak dan budidaya mangrove, serta tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 difokuskan untuk menjalankan kegiatan dalam bidang budidaya mangrove.</p> <p><b>Persamaan</b> Persamaan pada penelitian ini adalah terdapat pada metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p> <p><b>Perbedaan</b> Perbedaan pada penelitian ini adalah pada kajian fokus yang digunakan yang berbeda dalam penelitian terdahulu membahas Kolaborasi Pemerintah dalam Pembangunan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis.</p>

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu penelitian dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong, 2010:9) artinya adalah penelitian deskripsikan hanya berusaha mengungkapkan suatu fakta-fakta atau permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ada dilokasi penelitian tanpa adanya hipotesa terlebih dahulu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengertian metode ini kualitatif seperti yang di kemukakan oleh Creswell dalam metode Sugiyono (2017:3) bahwa metode penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok. Menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian ini mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat sementara. Mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang persial kedalam tema. Dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah pembuatan laporan kedalam struktur yang fleksibel. Artinya penelitian secara kualitatif tertuju pada objek yang alamiah atau sesuai dengan temuan yang ada dilapangan selanjutnya temuan tersebut dikumpulkan dan dipelajari untuk dijadikan data penunjang dalam penelitian yang diakhiri dengan pembuatan laporan kedalam struktur yang fleksibel.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu keadaan yang benar-benar terjadi/ fakta di lokasi penelitian. Dan setelah temuan fakta-fakta dilapangan, peneliti akan memaparkan hasil dari temuan tersebut apa adanya dan menuangkannya didalam laporan yang terstruktur dan fleksibel.

### Jenis Data Dan Sumber Data

1. Data Primer. Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama mereka, seperti wawancara, survei, dan eksperimen, tanpa menggunakan perantara. Data primer biasanya spesifik, tidak diolah, dan diperoleh dari sumber pertama langsung tanpa menggunakan perantara. Data yang dikumpulkan melalui percakapan langsung dilapangan dengan informan tentang Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis. Berdasarkan pada teori collaborative governance dari Ansel dan Gash yaitu terdapat partisipasi para pemangku kepentingan, terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan dan terdapat aktor-aktor yang kompeten, untuk mendapatkan informasi mengenai Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis.
2. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dikenal sebagai data sekunder. Karena peneliti tidak mendapatkan data secara langsung, peneliti bertindak sebagai pihak kedua. Data tambahan yang diperoleh dari tangan kedua, ketiga, atau seterusnya disebut sebagai data sekunder. Selain itu, dalam penelitian kuantitatif, data sekunder adalah jenis data tambahan yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian dan meningkatkan data primer. Data diroses atau data sumber kedua yang dikumpulkan dari makalah penelitian sebelumnya, jurnal, buku, internet, media massa dan sumber lain yang relevan untuk mendukung kelengkapan penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Observasi

Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2017:108), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan menurut Marsall, melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang mendasari semua ilmu pengetahuan yang didapat dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, untuk mengamati, mencatat, dan memaknai berbagai situasi dan kondisi serta gejala yang terjadi dilokasi penelitian tersebut.

2. In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)

Dalam penelitian kualitatif wawancara adalah bagian terpenting dalam proses pengambilan data karena berhadapan langsung dengan jawaban atas masalah yang hendak kita teliti. Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2017: 144) dengan menggunakan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam mengintrestasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak

bisa ditemukan melalui observasi. Apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih jelas lagi peneliti bisa menggunakan wawancara sebagai langkah pencarian data agar dapat mengetahui hal-hal yang lebih jelas lagi peneliti bisa menggunakan wawancara sebagai langkah pencarian data agar dapat mengetahui situasi yang terjadi dilokasi penelitian.

Dalam wawancara, penelitian menggunakan wawancara berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya lebih terarah pada satu tujuan. (Sugiyono, 2017:116). Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006:72) ciri khas dari wawancara mendalam ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden/informan.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa wawancara adalah adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang mendalam dengan langsung bertatap muka antara si pemberi pertanyaan dan si pemberi informasi dengan menggunakan panduan yang sudah ada dan dalam prosesnya peneliti lebih banyak mendengarkan si pemberi informasi tanpa terlalu terpaku pada pedoman wawancara. Untuk menunjang proses penelitian maka peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu: Pemerintah Desa Parangtritis, Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis, dan Masyarakat.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:124). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, flem, dan lain-lain. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang termasuk dalam dokumen. Dalam penelitian ini akan mengumpulkan dan mempelajari data-data yang termasuk dalam dokumen penunjang penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis**

Dalam penelitian ini, untuk melihat bagaimana Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parang Parangtritis. Penulis memfokuskan permasalahan yang dapat menerangkan dengan menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash ( 2008 ) ( Tresiena dkk, 2017 ) mengkonfilasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu: (1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan, (2) Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, dan (3) Terdapat aktor-aktor yang kompeten. Untuk dapat membahas ke empat indikator dari proses collaborasi governance berkaitan dengan fenomena permasalahan penelitian ini, maka penulis melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada infoman. Berikut wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis.

#### **1. Terdapat Partisipasi Para Pemangku Kepentingan**

Dalam proses kolaborasi, terdapat partisipasi para pemangku kepentingan merupakan proses yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam keputusan dan bagaimana keputusan tersebut dibuat. Mereka dapat berupa internal stakeholder (pemilik bisnis, karyawan, pemegang saham) atau eksternal stakeholder (pelanggan, supplier, pemerintah, masyarakat). Partisipasi pemangku kepentingan memiliki beberapa manfaat, seperti: Meningkatkan kualitas keputusan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan sudut pandang dan pengetahuan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang kompleks. Membangun kepercayaan dan kredibilitas, partisipasi pemangku kepentingan membantu membangun kredibilitas dan kepercayaan di dalam dan di luar organisasi. Mengurangi potensi risiko, organisasi dapat mendeteksi dan memitigasi risiko dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses manajemen risiko. Memberdayakan pemangku kepentingan. Organisasi atau perusahaan dapat mendapat wawasan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses inovasi. Dalam beberapa konteks, partisipasi pemangku kepentingan juga dapat membantu dalam penertiban pariwisata, pengembangan pariwisata, pengelolaan sampah, dan proyek-proyek lainnya.

Partisipasi adalah penggerak penting pada kolaborasi. Dimana dalam melaksanakan proses kolaborasi yang baik terdapat partisipasi kolaborasi didalamnya, dan didalam kolaborasi terdapat pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama serta kapasitas untuk melakukan tindakan secara bersama. Proses kolaborasi terungkap bahwa dalam penertiban pariwisata memiliki kepentingan bersama dari pihak dalam melakukan kerjasama serta kepentingan untuk bergabung dalam kolaborasi.

Dalam proses penertiban pariwisata, disetiap kegiatan yang berkaitan dengan kolaborasi atau kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam penertiban pariwisata di pantai parangtritis sudah terdapat partisipasi para pemangku kepentingan seperti dinas pariwisata, pihak kelurahan, kelompok-kelompok masyarakat yaitu pokdarwis, Pokja Pokdarwis Jaga Satru, Satpol PP. Partisipasi ini tidak bisa hanya sebelah pihak saja harus bekerjasama dengan baik apabila berkaitan dengan penertiban. Menunjukkan bahwa dalam proses penertiban pariwisata dipantai Parangtritis sudah cukup bagus karena dalam mencapai sebuah tujuan dalam penertiban sebuah objek pariwisata telah melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Dan dapat kita ketahui bahwa sudah ada partisipasi para pemangku kepentingan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai, misalnya terdapat kerjasama yang baik dan saling berkomunikasi.

Penertiban pariwisata pantai Parangtritis bekerjasama dengan pihak kelompok sadar wisata, agar penertiban bisa maksimal, karena jika hanya Dinas Pariwisata saja yang mengelola pantai Parangtritis pastinya sulit untuk mengelola kawasan pantai Parangtritis, disetiap kerjasama yang dilakukan dalam penertiban pariwisata di Parangtritis haruslah dikerjakan bersama-sama, hal inilah yang dinamakan pemangku kepentingan ikut berperan aktif atau ikut berpartisipasi dalam penertiban pariwisata

Penertiban pariwisata pantai Parangtritis pihak Dinas Pariwisata, kelompok dasar wisata saling bekerjasama dalam penertiban pariwisata. Inovasi-inovasi sudah ada dilakukukan sekarang ini, jadi belum ada sesuatu yang baru atau kegiatan yang baru lagi untuk dilakukan dalam penertiban pariwisata di pantai Parangtritis. Selain itu pihak pemerintah sudah memaksimalkan penertiban untuk saat ini. Karena dalam penertiban Pariwisata tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja akan, tetapi harus melibatkan pihak lain dalam penertiban pariwisata di pantai Parangtritis, hal ini sejalan dengan teori Ansel dkk yang mengatakan bahwa; Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan, Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, Terdapat aktor-aktor yang kompeten.

## **2. Terdapat Kondisi Dimana Ada Kesetaraan Kekuasaan**

Kesetaraan dan ketiadaan diskriminasi merujuk kepada pelaksanaan hak, kesempatan dan perlakuan yang setara dalam seluruh ruang lingkup kehidupan dan bekerja untuk seluruh orang tanpa memandang ciri-ciri seperti jenis kelamin, suku, ras, agama, penyandang disabilitas atau status kesehatan. Kesetaraan menyiratkan bahwa seluruh orang bebas untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka dan membuat pilihan tanpa membuat pembatasan berdasarkan stereotip, asumsi dan prasangka mengenai jenis kelamin, warna kulit, ras, suku, agama, penyandang disabilitas atau kondisi kesehatan. Kesetaraan tidak berarti seluruh orang memiliki kemampuan yang sama atau harus diperlakukan dengan cara yang sama. Kesetaraan berarti perilaku, aspirasi dan kebutuhan orang yang berbeda-beda sama-sama dipertimbangkan, bernilai dan dihargai tanpa melihat ciri-ciri seperti jenis kelamin, ras, suku dan status kesehatan atau ketidakmampuan sosial.

Dalam sebuah proses kolaborasi sangat diperlukan yang namanya kesetaraan kekuasaan dan hal itu yang dilakukan dengan Dinas Pariwisata, kelompok Sadar Wisata, Pokdarwis, Jaga Satru dikarenakan tidak bisa melakukannya sendiri dengan permasalahan yang ada memang harus bekerjasama dengan pihak lain juga lebih aktif bekerjasama dengan Pokdarwis dan kelompok masyarakat lainnya yang lebih paham dan aktif dilapangan. Dalam penertiban pariwisata pantai parangtritis semuanya sama, tidak ada yang namanya pihak yang lebih berkuasa dan pihak yang lebih bawah. Kesetaraan kekuasaan itulah yang dilihat dalam penertiban pariwisata pantai parangtritis, bekerjasama dan membangun relasi dalam kerja dilapangan maupun dalam berdiskusi mengungkapkan pendapat demi tercapai dan kemajuan pantai Parangtritis. Salah satu jalan yang harus ada adalah kesetaraan kekuasaan dengan melakukan deliberasi (diskusi bersama) dalam kolaborasi penertiban pariwisata pantai Parangtritis, sudah berjalan dengan baik disebabkan langkah yang ditempuh melalui diskusi sering dan terbuka dilakukan karena Dinas Pariwisata lebih mengutamakan transparansi .

Penertiban pariwisata pantai Parangtritis, kesetaraan kekuasaan atau sama rata itu sangat penting karena ini melakukan kerjasama, yang artinya dalam sebuah kerjasama tidak ada yang membedakan kecuali berbeda pendapat, dan tujuan kita sama yaitu ingin adanya perkembangan terhadap pariwisata yang kelola saat ini. Kesetaraan dengan semua pihak sangatlah penting dalam melakukan kolaborasi karena tanpa adanya kesetaraan antara pihak yang melakukan kolaborasi maka kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik. Kesetaraan bersama antara pihak dalam penertiban pariwisata pantai Parangtritis sudah baik karena seiring berjalannya waktu kesetaraan antara semua pihak semakin membaik dikarenakan saling memberi informasi serta seringnya diskusi sehingga proses kolaborasi dalam penertiban pariwisata pantai Parangtritis berjalan dengan baik.

### 3. Terdapat Aktor-Aktor Yang Kompeten

Partisipasi masyarakat lokal Parangtritis sangat besar, namun kontribusi aktor-aktor lainnya juga sama besarnya. Sinergi yang baik antara masyarakat lokal Parangtritis dengan Pemerintah, membuat Pantai Parangtritis menjadi lebih banyak dikunjungi dan diminati oleh para wisatawan. Wisata Pantai Parangtritis dapat disimpulkan bahwa kesuksesan yang saat ini diperoleh, ada kerjasama yang baik antara masyarakat lokal dengan aktor-aktor yang kompeten yang berfungsi sebagai konseptor. Peran aktor tersebut cukup besar dalam pengembangan Wisata Pantai Parangtritis. Peran aktor dalam mendirikan Wisata yang sebelumnya dikelola masyarakat lokal, namun jalan ditempat. Keberadaan aktor mempunyai dampak yang positif untuk kemajuan Wisata Parangtritis. Pro dan kontra nampaknya menjadi hal lumrah dalam seseorang menjalankan perannya.

Kedekatan antara masyarakat lokal Wisata Parangtritis dan aktor yang berperan menjadikan tali silaturahmi yang sangat baik, aktor seakan-akan menjadi masyarakat lokal Parangtritis. Mereka melebur menjadi satu-kesatuan yang sangat apik. Peran penting dalam pengembangan potensi pariwisata bukan hanya pada peran pemerintah pusat ataupun daerah, tetapi melainkan peran keseluruhan aktor yang berada didalam masyarakat pariwisata yang memiliki peran penting dalam menumbuh kembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini mampu diwujudkan apabila kerjasama keseluruhan aktor masyarakat pariwisata dapat terlaksana dengan baik, atau dengan istilah lain terwujudnya Collaborative Governance di sektor pariwisata. Collaborative atau kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Ini menyiratkan baik aktor maupun individu, kelompok atau organisasi bekerjasama dalam beberapa kegiatan. (O'Flynn & Cinta, 2000); collaborative governance menurut (Ansell dan Gash, 2007), sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga-lembaga publik bersama aktor non Negara dan pemangku kepentingan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi consensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik atau asset.

Dalam penertiban ini, semua individu yang berkaitan ikut mengambil alih dan bekerjasama dengan baik. Tentu dalam melaksanakan penertiban pariwisata pantai parangtritis peran aktor-aktor yang kompeten begitu penting dalam mengarahkan kelompok masyarakat lainnya karena salah satu kelompok yang paling aktif atau instansi yang memiliki tugas dalam penertiban pariwisata dan disamping itu pokdarwis, membutuhkan dukungan serta kerjasama dari pihak lain untuk melaksanakan penertiban pariwisata di pantai Parangtritis.

Pihak Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan melakukan pertemuan dalam upaya memajukan kolaborasi. Saat ini sudah efektif karena komunikasi dengan pemerintah, masyarakat dan pihak kelompok sadar wisata berjalan dengan baik dan sering melakukan pertemuan untuk membicarakan masalah penertiban di kawasan pantai Parangtritis, apalagi disini membidangi Pariwisata dan harus memperhatikan perkembangan wisata disekiraran Parangtritis. Dapat diketahui bahwa dalam penertiban pariwisata pantai Parangtritis pihak yang terkait bertanggung jawab untuk menciptakan SAPTA PESONA guna terciptanya lingkungan yang kondusif dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan dikawasan pantai Parangtritis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar wisata dan dijalankan dengan baik. Wisata diparangtritis ini merupakan wisata berbasis Masyarakat bukan milik kelompok dan bukan juga milik Pemerintah, dan disinilah para terkait ikut menjaga dan melestarikan wisata ini supaya dapat dinikmati penerus selanjutnya.

### KESIMPULAN

Partisipasi dalam kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai Parangtritis Kabupaten Bantul masih kurang terlaksana dengan baik walaupun dalam pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak kelompok sadar wisata namun kelompok ini secara kelembagaan tidak terlalu aktif, serta komunikasi belum berjalan dengan baik juga kurangnya kepercayaan antara semua pihak dan komitmen mereka belum kuat walaupun dalam berkolaborasi sudah mengacu pada SK Kepala Dinas Pariwisata.

Tindakan-tindakan kolaborasi dalam penertiban pariwisata pantai Parangtritis Kabupaten Bantul dalam memfasilitasi kolaborasi belum maksimal karena jarang ada pelatihan dan sosialisasi tentang kepariwisataan guna meningkatkan kemampuan pihak yang berkolaborasi, dan untuk memajukan proses kolaborasi pihak yang bekerjasama jarang melakukan pertemuan.

Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi penertiban pariwisata pantai Parangtritis Kabupaten Bantul sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh akan kepariwisataan serta membuka peluang pendapatan kepada masyarakat namun hal ini belum signifikan karena kondisi pantai Parangtritis yang belum berkembang dengan baik dilihat dari SAPTA PESONA dikawasan pantai Parangtritis belum tercapai secara keseluruhan, walaupun demikian tanggapan kedua pihak yang bekerjasama mengenai dampak yang dihasilkan sudah cukup baik meski masih ada tujuan yang belum dicapai.

Saran : Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Collaborative Governance atau Kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, oleh karena itu peneliti menyarankan: 1. Dinas Pariwisata dan POKDARWIS harus lebih berperan aktif serta perlu ada regenerasi di pihak POKDARWIS agar lebih aktif lagi berkolaborasi dalam melakukan penertiban untuk mengembangkan

pariwisata Parangtritis 2. Dinas Pariwisata dan POKDARWIS harus membangun komunikasi yang lebih baik dan melakukan pertemuan. Serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada dikawasan wisata untuk memberikan pemahaman tentang sadar wisata. 3. Dinas Pariwisata dan POKDARWIS harus lebih meningkatkan lagi proses kolaborasi yang dilakukan agar dapat mengembangkan pantai Parangtritis menjadi lebih baik. 4. Harus selalu berbenah melakukan inovasi-inovasi yang sudah ada. Dinas Pariwisata, Pokdarwis, Pokja Pokdarwis, Jaga Satru, dan SOSDL juga harus rutin melaksanakan evaluasi terkait penertiban pariwisata pantai parangtritis.

## **REFERENSI**

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.

Adianto, Fahriadi. "Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru."

Pratiwi, T. S., & Arisanto, P. T. (2021, December). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Merespon Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Pendekatan Crisis Visualizations. In *Proceeding International Relations on Indonesian Foreign Policy Conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 249-271).

Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). In *Prosiding Seminar Nasional Unimus* (Vol. 1).

MONIKA, M. (2022). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD").

Zaenuri, Muhammad. 2016. Tata kelola pariwisata-bencana dalam perspektif collaborative governance( studi kasus pariwisata-bencana lava tour merapi kabupaten selem ).

Peraturan Perundang-undangan : Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan